

**LAPORAN PELAKSANAAN
PENERAPAN TATA KELOLA (GCG)
PT BPR ARTA AGUNG YOGYAKARTA
TAHUN 2023**



**PT. Bank Perkreditan Rakyat
Arta Agung Yogyakarta**

**Jalan Piyungan No 1 Bokoharjo Prambanan Sleman Yogyakarta 55572
TELEPON: 0274-496102**



BAB I

PENJELASAN UMUM

Perkembangan industri perbankan yang sangat pesat pada umumnya disertai dengan semakin kompleksnya kegiatan usaha Bank yang mengakibatkan peningkatan eksposur risiko Bank. Good Corporate Governance (GCG) pada industri perbankan menjadi lebih penting untuk saat ini dan dimasa yang akan datang mengingat risiko dan tantangan yang dihadapi oleh industri perbankan akan semakin meningkat.

Dalam rangka meningkatkan kinerja Bank, melindungi kepentingan Stakeholders dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta nilai etika (code of conduct) yang berlaku secara umum dalam industri perbankan, Bank wajib melaksanakan kegiatan usahanya dengan berpedoman pada prinsip-prinsip GCG.

Tujuan Pelaksanaan GCG di BPR Arta Agung Yogyakarta

- a. Meningkatkan kinerja Bank dengan menerapkan GCG dalam segala kegiatan Bank sejalan dengan visi, misi dan rencana strategi usaha yang telah ditetapkan Bank.
- b. Menjaga agar kegiatan operasional Bank mematuhi peraturan internal dan eksternal Bank, serta perundangan yang berlaku.
- c. Meningkatkan pertanggungjawaban dan memberikan nilai tambah Bank kepada Stakeholders.
- d. Memperbaiki budaya kerja Bank.
- e. Mengelola sumber daya Bank secara lebih baik.
- f. Mendorong dan mendukung pengembangan Bank.



BAB II

TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA BPR

A. Pengungkapan Penerapan Tata Kelola

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi		
1.	Nama	:	Wibowo Priyono, SE, MM
	NIK	:	3471100804620001
	Jabatan	:	Direktur Utama
	Tugas dan Tanggung Jawab :		
<ul style="list-style-type: none"> - Memimpin dan mengurus BPRAAY sesuai dengan maksud dan tujuan BPRAAY; - Melaksanakan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan (Good Corporate Governance) dalam setiap kegiatan usaha BPRAAY pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi BPRAAY; - Menciptakan struktur pengendalian internal, menjamin terselenggaranya fungsi audit internal dalam setiap tingkatan manajemen dan menindaklanjuti temuan audit internal sesuai dengan kebijakan atau arahan yang diberikan Dewan Komisaris; - Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Auditor Eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia dan/atau hasil pengawasan otoritas lain; - Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya kepada pemegang saham melalui Rapat Pemegang Saham; - Mewakili BPRAAY di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat BPRAAY dengan pihak lain dan pihak lain dengan BPRAAY, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, dengan pembatasan sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar BPRAAY; - Mengatur ketentuan tentang kepegawaian BPRAAY, termasuk penetapan gaji, pensiun atau jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi pegawai BPRAAY, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau keputusan Rapat Umum Pemegang Saham; - Manajemen Likuiditas (Kas dan Bank); - Manajemen Perkreditan. 			
2.	Nama	:	Ririn Nareswari, BSC
	NIK	:	3471136911610002
	Jabatan	:	Direktur yang menjalankan fungsi kepatuhan
	Tugas dan Tanggung Jawab :		
<ul style="list-style-type: none"> - menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan OJK dan peraturan perundang-undangan lain; - memantau dan menjaga agar kegiatan usaha BPR tidak menyimpang dari peraturan perundang-undangan; - memantau dan menjaga kepatuhan BPRAAY terhadap seluruh komitmen BPRAAY kepada OJK dan otoritas lain; - melaporkan kepada anggota Direksi lainnya dan Dewan Komisaris secara tertulis terkait pelanggaran kepatuhan yang dilakukan oleh pegawai BPRAAY; - memastikan terlaksananya sosialisasi dan pelatihan berkelanjutan kepada seluruh unit kerja BPR mengenai POJK terkini dan peraturan perundang-undangan lain; dan - melapor kepada Dewan Komisaris secara tertulis terkait pelanggaran kepatuhan yang dilakukan oleh Direksi BPR; - Supervisi kerja kepada PE Kepatuhan; - Sosialisasi kebijakan, peraturan dan pengembangan SDM 			
Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris :			
<ol style="list-style-type: none"> 1. Bank dapat lebih Inovatif dalam menciptakan Produk Baru Terutama produk kredit agar pertumbuhan Kredit dapat lebih Optimal. 2. Bank dapat lebih menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menyalurkan Kredit untuk mencegah terjadinya Kredit Bermasalah. 3. Bank agar dapat memulai mengembangkan layanan berbasis IT karena persaingan di Dunia Perbankan Digital telah semakin ketat. 			



PT BPR ARTA AGUNG YOGYAKARTA

1 Piyungan No 1 Bokoharjo Prambanan Sleman Yogyakarta 55572

Telepon: 0274-496102

PT. Bank Perkreditan Rakyat

Arta Agung Yogyakarta

Website: www.bprartaagung.co.id. Email: bpr_arta_agung@yahoo.com

- | |
|---|
| 4. Bank agar selalu update informasi tentang kebijakan otoritas dan pemerintah. |
| 5. Bank dalam hal peningkatan skill SDM harus lebih optimal. |

Penjelasan Lebih Lanjut :

Nihil

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris		
1.	Nama	:	Wikan Triargono, SE, SH, MM, Mkn.
	NIK	:	3404080604650001
	Jabatan	:	Komisaris Utama
	Tugas dan Tanggung Jawab :		
<ul style="list-style-type: none"> Dewan Komisaris telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan Keputusan RUPS. Dewan Komisaris telah melakukan tugas pengawasan terhadap kebijakan Direksi dalam melaksanakan pengurusan bank serta memberikan nasehat kepada Direksi. Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya secara independen. Dewan Komisaris wajib memastikan terselenggaranya pelaksanaan GCG dalam setiap kegiatan usaha bank. Dewan Komisaris telah membentuk Audit Internal untuk membantu pelaksanaan tugasnya dalam penerapan GCG. Dewan Komisaris berwenang untuk meminta direksi menindaklanjuti hasil temuan Audit Internal, Otoritas Jasa Keuangan dan pengawas otoritas lainnya. Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional bank, kecuali dalam hal ; penyediaan dana kepada pihak terkait, memberikan persetujuan pada ranahnya komisaris terutama yang berkaitan dengan penyimpangan- penyimpangan dalam operasional dan kredit serta hal- hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank dan/atau peraturan perundang yang berlaku. 			
2.	Nama	:	Drs H Bambang Nuryanto
	NIK	:	3404020306600004
	Jabatan	:	Komisaris
	Tugas dan Tanggung Jawab :		
<ul style="list-style-type: none"> Dewan Komisaris telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan Keputusan RUPS. Dewan Komisaris telah melakukan tugas pengawasan terhadap kebijakan Direksi dalam melaksanakan pengurusan bank serta memberikan nasehat kepada Direksi. Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya secara independen. Dewan Komisaris wajib memastikan terselenggaranya pelaksanaan GCG dalam setiap kegiatan usaha bank. Dewan Komisaris telah membentuk Audit Internal untuk membantu pelaksanaan tugasnya dalam penerapan GCG. Dewan Komisaris berwenang untuk meminta direksi menindaklanjuti hasil temuan Audit Internal, Otoritas Jasa Keuangan dan pengawas otoritas lainnya. Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional bank, kecuali dalam hal ; penyediaan dana kepada pihak terkait, memberikan persetujuan pada ranahnya komisaris terutama yang berkaitan dengan penyimpangan- penyimpangan dalam operasional dan kredit serta hal- hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank dan/atau peraturan perundang yang berlaku. 			
Rekomendasi Kepada Direksi :			
<ul style="list-style-type: none"> - Harus selalu siap menghadapi persaingan dan memiliki strategi untuk menghadapi persaingan antar BPR yang semakin ketat ; - Jadikan RBB 2024 sebagai acuan kerja dan selalu dilakukan monitoring; - Penyelesaian kredit bermasalah yang lebih komprehensif sehingga target NPL dapat tercapai dan terhindar dari kerugian; 			
Penjelasan Lebih Lanjut :			
Nihil			



3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite (jika ada)

a. Tugas dan Tanggung Jawab Komite

No.	Tugas dan Tanggung Jawab Komite
1.	Komite Audit
	Tugas dan Tanggung Jawab :
	Tidak ada
2.	Komite Pemantau Risiko
	Tugas dan Tanggung Jawab :
	Tidak ada
3.	Komite Remunerasi dan Nominasi
	Tugas dan Tanggung Jawab :
	Tidak ada
Tindak Lanjut Rekomendasi Tugas dan Tanggung Jawab Komite	
BPR Arta Agung Yogyakarta Tidak memiliki Komite	

b. Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite

No.	Nama	NIK	Keahlian	Jabatan di Komite	Pihak Independen
1.					
2.					
3.					
Tindak Lanjut Rekomendasi Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite			:	BPR Arta Agung Yogyakarta Tidak memiliki Komite	

c. Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite

No.	Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite		
1.	Komite Audit		
	Program	:	-
	Realisasi	:	-
	Jumlah Rapat	:	-
2.	Komite Pemantau Risiko		
	Program	:	-
	Realisasi	:	-
	Jumlah Rapat	:	-
3.	Komite Remunerasi dan Nominasi		
	Program	:	-
	Realisasi	:	-
	Jumlah Rapat	:	-
Penjelasan Lebih Lanjut			
BPR Arta Agung Yogyakarta Tidak memiliki Komite			



B. Kepemilikan Saham Direksi

1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR

No.	Nama Direksi	NIK	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Wibowo Priyono, SE, MM	3471100804620001	Rp0	0%
2.	Ririn Nareswari, BSC	3471136911610002	Rp0	0%
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Seluruh Anggota Direksi BPR Arta Agung Yogyakarta tidak memiliki Saham pada BPR Arta Agung Yogyakarta.				

2. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain

No.	Nama Direksi	NIK	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Wibowo Priyono, SE, MM	3471100804620001	-	-	0%
2.	Ririn Nareswari, BSC	3471136911610002	-	-	0%
Penjelasan Lebih Lanjut :					
Seluruh Anggota Direksi BPR Arta Agung Yogyakarta Tidak memiliki Saham pada Perusahaan Lain					

C. Hubungan Keuangan dan/ atau Hubungan Keluarga Anggota Direksi dengan Anggota Direksi Lain, Anggota Dewan Komisaris dan/ atau Pemegang Saham

1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR

No.	Nama Direksi	NIK	Hubungan Keuangan		
			Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	Wibowo Priyono, SE, MM	3471100804620001	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	Ririn Nareswari, BSC	3471136911610002	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :					
Seluruh Anggota Direksi Tidak memiliki Hubungan Keuangan dengan sesama Anggota Direksi, dengan Anggota Dewan Komisaris maupun dengan Pemegang Saham.					

2. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR

No.	Nama Direksi	NIK	Hubungan Keluarga		
			Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	Wibowo Priyono, SE, MM	3471100804620001	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	Ririn Nareswari, BSC	3471136911610002	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :					
Seluruh Anggota Direksi Tidak memiliki Hubungan Keluarga dengan sesama Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris maupun Dengan Pemegang Saham					



D. Kepemilikan Saham Dewan Komisaris

1. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	Nama Dewan Komisaris	NIK	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Wikan Triargono, SE, SH, MM, Mkn.	3404080604650001	Rp1.584.000.000	24%
2.	Drs H Bambang Nuryanto	3404020306600004	Rp1.848.000.000	28%
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Komisaris Utama memiliki 24% Saham (Rp 1.584.000.000,-) sedangkan Komisaris memiliki 28% (Rp 1.848.000.000,-) sekaligus sebagai Pemegang Saham Pengendali (PSP).				

2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

No.	Nama Dewan Komisaris	NIK	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Drs H Bambang Nuryanto	3404020306600004	602009	PT BPR Arta Mas Surakarta	31.89%
Penjelasan Lebih Lanjut :					
Komisaris BPR Arta Agung Yogyakarta memiliki Saham di Perusahaan Lain di BPR Arta Mas Surakarta sebesar 31,89 %					

E. Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dengan Anggota Dewan Komisaris Lain, Anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham BPR

1. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	Nama Dewan Komisaris	NIK	Hubungan Keuangan		
			Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris Lain	Pemegang Saham
1.	Wikan Triargono, SE, SH, MM, Mkn.	3404080604650001	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	Drs H Bambang Nuryanto	3404020306600004	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :					
Seluruh Anggota Dewan Komisaris Tidak Memiliki Hubungan Keuangan dengan Anggota Direksi, sesama Anggota Dewan Komisaris maupun Dengan Pemegang Saham					



2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	Nama Dewan Komisaris	NIK	Hubungan Keluarga		
			Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris Lain	Pemegang Saham
1.	Wikan Triargono, SE, SH, MM, Mkn.	3404080604650001	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	Drs H Bambang Nuryanto	3404020306600004	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :					
Seluruh Anggota Dewan Komisaris Tidak Memiliki Hubungan Keluarga dengan Anggota Direksi, sesama Anggota Dewan Komisaris maupun Dengan Pemegang Saham					

F. Paket/ Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

1. Paket/ Kebijakan Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No.	Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1.	Gaji	2	Rp414.000.000	2	Rp272.400.000
2.	Tunjangan	2	Rp9.600.000	2	Rp9.600.000
3.	Tantiem	0	Rp0	0	Rp0
4.	Kompensasi Berbasis Saham	0	Rp0	0	Rp0
5.	Remunerasi Lainnya	0	Rp0	0	Rp0
Total			Rp423.600.000		Rp282.000.000
Penjelasan Lebih Lanjut :					
Untuk Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris mendapatkan Gaji dan Tunjangan, Tidak mendapatkan Tantiem, Kompensasi Berbasis Saham maupun Remunerasi lainnya					

2. Uraian Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No.	Jenis Fasilitas Lain (Dalam 1 Tahun)	Uraian Fasilitas Disertai dengan Jumlah Fasilitas (Unit)	
		Direksi	Dewan Komisaris
1.	Perumahan	Tidak ada	Tidak ada
2.	Transportasi	Tidak ada	Tidak ada
3.	Asuransi Kesehatan	BPJS Kesehatan (2)	BPJS Kesehatan (2)
4.	Fasilitas Lainnya	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :			
Anggota Direksi dan Dewan Komisaris mendapat Fasilitas Asuransi Kesehatan yaitu BPJS Kesehatan.			



G. Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah

Keterangan	Perbandingan
	(a/b) : 1
Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	4 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	1.09 : 1
Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	1.06 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (b)	1.5 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji Pegawai yang tertinggi (b)	2 : 1
Penjelasan Lebih Lanjut :	
a. Rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah adalah 4 : 1 b. Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah adalah 1,09 : 1 c. Rasio gaji Komisaris yang tertinggi dan terendah adalah 1,064 : 1 d. Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan Komisaris tertinggi adalah 1,5 : 1 e. Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan Pegawai tertinggi adalah 2 : 1	

H. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris

1. Pelaksanaan Rapat dalam 1 (satu) tahun

No.	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
1.	16 Januari 2023	3	1. Rencana Bisnis BPR Kuartal 1 Tahun 2023 2. Isu-isu Strategis BPR - KAP BPR Tahun 2022 mengalami kenaikan terutama di kolektibilitas Macet - Jumlah DPK juga meningkat, yang memerlukan perhatian serius dari Direksi dan Pejabat2 terkait. Strategi menekan DPK antara lain : Monitoring ketat terhadap Kredit Lancar tapi menunggak, penyelesaian kredit dilakukan sejak awal tdk menunggu kredit hingga menjadi DPK. - Identifikasi perlu dilakukan untuk kredit pada posisi DPK sebagai pertimbangan penyelesaian yg tepat untuk kredit pada posisi DPK. 3. Evaluasi/Penetapan Kebijakan Strategis BPR - Strategi Pemasaran hendaknya fokus pada pasar tertentu (Target market tertentu) tidak melebar ke semua sektor - Biaya Dana cukup terkendali pada Tahun 2022, tapi bisa lebih rendah lagi apabila dari awal Tahun Direksi fokus merancang produk Tabungan berjangka yg menarik dan dipasarkan pada segmen masing2. 4. Evaluasi Realisasi Bisnis Kuartal 4 Tahun 2022 5. Saran2 kepada Direksi sebagai hasil pengawasan Dekom
2.	18 April 2023	3	1. Rencana Bisnis BPR Kuartal 2 Tahun 2023 2. Isu-isu Strategis BPR - Peningkatan Kualitas Kredit Restrukturisasi Dampak Covid19 - Rencana Direksi Kerjasama dengan perusahaan Fintech (Komunal dan Artaku) 3. Evaluasi/Penetapan Kebijakan Strategis BPR - Kebijakan strategis BPR terkait segmen dan target pasar usaha mikro dan kecil di sekitar Prambanan belum fokus



			<p>karena angka realisasi kredit wilayah Prambanan masih rendah dibawah 20%.</p> <ul style="list-style-type: none">- Terkait penghimpunan dana, upaya menekan COF yakni mengurangi porsi pinjaman dari bank lain yang akan lunas pada Bulan April 2023, akan tetapi sebaliknya terjadi peningkatan produk deposito yang berbiaya bunga cukup tinggi, sedangkan penghimpunan produk tabungan yang berbiaya bunga rendah belum optimal. <p>4. Evaluasi Realisasi Bisnis Kuartal 1 Tahun 2023 5. Saran-saran kepada Direksi sebagai hasil pengawasan Dekom.</p>
3.	13 Juli 2023	3	<p>1. Rencana Bisnis BPR Kuartal 3 Tahun 2023 2. Isu-isu Strategis BPR</p> <ul style="list-style-type: none">- Hasil Stress Test Kredit Restrukturisasi Nasabah Dampak Covid19- Rencana Direksi Kerjasama dengan perusahaan Fintech <p>3. Evaluasi/Penetapan Kebijakan Strategis BPR</p> <ul style="list-style-type: none">- Kebijakan strategis BPR terkait segmen dan target pasar usaha mikro dan kecil di sekitar Prambanan mulai membaik- Terkait penghimpunan dana, upaya untuk meningkatkan Tabungan perlu menyasar segmen dan target pasar tepat yang menyimpan di BPR untuk tujuan investasi bukan transaksi. <p>4. Evaluasi Realisasi Bisnis Kuartal 2 Tahun 2023 5. Saran-saran kepada Direksi sebagai hasil pengawasan Dekom.</p> <ul style="list-style-type: none">- Terhadap Rencana Bisnis Kuartal 3, Direksi harus bersikap pruden dan mencapai target sesuai RBB 2023.- Direksi disarankan bila perlu membentuk Unit Kerja Khusus (UKK) Penyelesaian Kredit Restruk supaya pemulihan dapat dilakukan lebih cepat
4.	12 Oktober 2023	3	<p>1. Rencana Bisnis BPR Kuartal 4 Tahun 2023 2. Isu-isu Strategis BPR</p> <ul style="list-style-type: none">- Penyelesaian Kredit terdampak Covid 19 maksimal di akhir Tahun 2023- Rasio kredit kualitas rendah (KKR) atau disebut LAR (loan At Risk) saat ini masih tinggi, perlu menjadi perhatian dan segera dilakukan tindakan.- Ketentuan OJK baru yaitu POJK No 3/2022 terkait TKS dan POJK No 06/2022 terkait Perlindungan Konsumen perlu mendapat perhatian serius Direksi dan Para PE. <p>3. Evaluasi/Penetapan Kebijakan Strategis BPR</p> <ul style="list-style-type: none">- Peningkatan Kompetensi SDM terkait sasaran dan tujuan pasar tersebut sangat penting mengingat keunggulan BPR ada pada pelayanan.- Terkait penghimpunan dana, upaya untuk meningkatkan Tabungan perlunya variasi produk Tabungan sesuai sasaran & tujuan pasar terutama Tabungan berjangka yang memiliki tenor lebih panjang. Misalnya Tabungan Emas, Tabungan Haji/Umroh, Tabungan Pendidikan, Tabungan Arisan dll. <p>4. Evaluasi Realisasi Bisnis Kuartal 3 Tahun 2023 5. Saran-saran kepada Direksi sebagai hasil pengawasan Dekom.</p> <ul style="list-style-type: none">- Segera sosialisasikan dan Implementasikan POJK No 03/2022 dan POJK No 06/2022 mengingat pentingnya untuk industri BPR.- Hasil Evaluasi realisasi bisnis Kuartal 3 tahun 2023, Direksi menjaga kualitas kredit dengan pertumbuhan kredit baru dan maintain kredit existing secara sehat.
Penjelasan Lebih Lanjut Pelaksanaan Rapat dalam 1 tahun :			
Rapat Dewan Komisaris Selama Tahun 2023 Dilaksanakan sebanyak 4 kali			



2. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

No.	Nama Dewan Komisaris	NIK	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (dalam %)
			Fisik	Telekonferensi	
1.	Wikan Triargono, SE, SH, MM, Mkn.	3404080604650001	4	0	100%
2.	Drs H Bambang Nuryanto	3404020306600004	4	0	100%
Penjelasan Lebih Lanjut :					
Tingkat Kehadiran Anggota Dewan Komisaris Secara Fisik sebanyak 4 kali dalam 1 Tahun dan secara Telekonferensi sebanyak 0 kali dalam 1 Tahun.					

I. Jumlah Penyimpangan Internal (Internal Fraud)

Jumlah Penyimpangan Internal*) (Dalam 1 Tahun)	Jumlah Kasus (Satuan) yang Dilakukan Oleh							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan
Total Fraud	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah Diselesaikan		0		0		0		0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0	0	0	0	0	0	0
Belum Diupayakan Penyelesaiannya	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum		0		0		0		0
Penjelasan Lebih Lanjut :								
Tidak Ada Penyimpangan Internal (Internal Fraud)								

J. Permasalahan Hukum yang Dihadapi

Permasalahan Hukum	Jumlah (Satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah Selesai	1	0
Dalam Proses Penyelesaian	3	0
Total	4	0
Penjelasan Lebih Lanjut		
Sepanjang Tahun 2023 Permasalahan Hukum yang dihadapi BPR sebanyak 4 masalah Perdata, 1 telah diselesaikan dan 3 dalam proses penyelesaian		



K. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

No.	Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan			Pengambil Keputusan			Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Jutaan Rupiah)	Keterangan
	Nama	Jabatan	NIK	Nama	Jabatan	NIK			
1.									
2.									
3.									
Penjelasan Lebih Lanjut :									
Tidak ada Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan									

L. Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik

No.	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/ Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	Jumlah (Rp)
1.	27 Juni 2023	Sosial	Pembelian Hewan Qurban	Mesjid Berbah	Rp3.500.000
2.	27 Juni 2023	Sosial	Pembelian Hewan Qurban Kambing	Mesjid Al Husna Ds Prambanan	Rp3.500.000
Penjelasan Lebih Lanjut Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik					
Tidak ada Pemberian Dana Untuk Kegiatan Politik					

Yogyakarta, 25 Januari 2023

PT BPR ARTA AGUNG YOGYAKARTA

Wibowo Priyono, SE. MM
Direktur Utama

Wikan Triargono, SE. SH. MM. Mkn
Komisaris Utama